



Integrasi Tata Usaha, BMN, SDM, dan Keuangan dalam Sistem Fasilitatif Keimigrasian

Dimas Pramudya Sanjaya¹, Cheflī², Eunike Leoni Sinaga^{3*}, Abbyl Mohar Muhammad⁴

¹⁻⁴ Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Indonesia

^{*}Korespondensi penulis: sinaga2nike@gmail.com³

Abstract: This study aims to analyze the integration of administration, state property management, human resources, and finance in supporting a facilitative immigration system. These four aspects are essential pillars for maintaining efficiency, effectiveness, and transparency in public service delivery within immigration institutions. However, their implementation often operates separately, causing inefficiency and delays in administrative decision-making. Using a descriptive-analytical approach based on literature review and regulatory analysis, this study finds that structured collaboration among administrative units strengthens internal coordination and improves service quality for the public. Administration functions as the foundation for documentation and record management, state property supports operational infrastructure, human resources drive organizational performance, and finance ensures program continuity and budget accountability. The integration of these components creates a more adaptive, transparent, and accountable work system to face global challenges, especially in the era of digital public services. The study recommends implementing an integrated information system, enhancing personnel competencies, and optimizing budget planning and supervision to achieve professional and competitive immigration governance.

Keywords: Administration; Finance; Human Resources; Integration; State Property

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara tata usaha, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sumber daya manusia (SDM), dan keuangan dalam mendukung sistem fasilitatif keimigrasian. Keempat aspek ini merupakan pilar penting dalam menjaga efektivitas, efisiensi, serta transparansi pelayanan publik di lingkungan keimigrasian. Namun, pelaksanaannya sering kali berjalan secara terpisah, menyebabkan ineffisiensi dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan administratif. Melalui pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi literatur dan telaah regulasi, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi yang terencana antara unit-unit administratif mampu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tata usaha berfungsi sebagai fondasi pengelolaan dokumen dan arsip, BMN berperan dalam penyediaan sarana prasarana operasional, SDM menjadi motor penggerak kinerja organisasi, sementara keuangan memastikan kesinambungan program serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Integrasi keempat komponen tersebut mendorong terciptanya sistem kerja yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan global, terutama di era digitalisasi pelayanan publik. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem informasi terintegrasi, penguatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi perencanaan dan pengawasan anggaran sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keimigrasian yang profesional dan berdaya saing tinggi.

Kata Kunci: Administrasi; Integrasi; Kekayaan Negara; Keuangan; Sumber Daya Manusia.

1. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan institusi strategis yang menjalankan fungsi negara di bidang pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Imigrasi tidak hanya mengandalkan regulasi dan teknologi, tetapi juga membutuhkan dukungan administrasi, manajemen aset, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), serta sistem keuangan yang efektif. Oleh karena itu, integrasi antara tata usaha, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SDM, dan keuangan menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk mewujudkan sistem fasilitatif keimigrasian yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Tata usaha berfungsi sebagai fondasi administrasi, mencakup kegiatan surat-menurut, arsip, dan dokumentasi yang mendukung kelancaran proses layanan maupun pengawasan. BMN menyediakan sarana prasarana yang memungkinkan terlaksananya tugas keimigrasian, mulai dari gedung, peralatan teknologi informasi, hingga kendaraan operasional. Sementara itu, SDM merupakan faktor kunci yang menentukan kualitas pelayanan dan pengawasan, sehingga pengelolaannya harus berorientasi pada kompetensi, integritas, dan profesionalitas. Aspek keuangan pun memegang peranan vital sebagai sumber daya untuk membiayai program, menyediakan fasilitas, dan memastikan keberlangsungan layanan keimigrasian.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya sinkronisasi antarunit, lemahnya pengawasan internal terhadap aset dan anggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi sistem. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik, memperlambat respons pengawasan orang asing, dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi tata usaha, BMN, SDM, dan keuangan dalam sistem fasilitatif keimigrasian. Dengan memadukan pendekatan normatif dan manajerial, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola kelembagaan imigrasi, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis dalam menghadapi tantangan pelayanan keimigrasian di era digital dan globalisasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Tata usaha merupakan elemen dasar dalam sistem administrasi publik yang berperan penting dalam menjaga keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Menurut Siagian (2018), tata usaha berfungsi sebagai sarana pengelolaan informasi dan dokumentasi yang mendukung proses pengambilan keputusan organisasi. Dalam konteks keimigrasian, tata usaha berperan dalam pencatatan dokumen perjalanan, arsip kepegawaian, surat menyurat, serta pelaporan kegiatan kelembagaan. Ketidakterpaduan dalam sistem tata usaha dapat menimbulkan ketidaksesuaian data antarunit dan menghambat koordinasi antarbagian. Karena itu, sistem administrasi yang berbasis digital dan terintegrasi sangat diperlukan agar seluruh proses kerja di lingkungan keimigrasian dapat berjalan cepat, akurat, dan terukur. Integrasi tata usaha juga menjadi pondasi untuk menyatukan data BMN, keuangan, dan SDM dalam satu sistem yang saling terhubung.

Barang Milik Negara (BMN) menjadi unsur strategis dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan, termasuk di bidang keimigrasian. Menurut Kementerian Keuangan (2021),

pengelolaan BMN harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas untuk memastikan nilai manfaat aset negara tetap optimal. Dalam sistem fasilitatif keimigrasian, BMN meliputi aset fisik seperti gedung kantor, perangkat layanan, sistem IT, kendaraan dinas, serta sarana pendukung lainnya. Ketidakefisienan dalam pengelolaan BMN sering kali berdampak pada keterbatasan pelayanan publik dan peningkatan biaya operasional. Oleh karena itu, integrasi BMN dengan tata usaha dan sistem keuangan diperlukan agar setiap aset tercatat secara akurat, terpantau penggunaannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Pengelolaan BMN yang terintegrasi juga dapat mendukung digitalisasi layanan keimigrasian dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi karena menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan dan operasional lembaga. Menurut Hasibuan (2019), manajemen SDM yang efektif mencakup perencanaan, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, serta pembinaan etika kerja. Dalam keimigrasian, SDM tidak hanya dituntut memiliki keterampilan administratif, tetapi juga kemampuan adaptif terhadap teknologi informasi dan pemahaman hukum keimigrasian. Ketidakseimbangan kompetensi antarpegawai dapat menghambat pelaksanaan integrasi tata kelola lembaga. Untuk itu, diperlukan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang terhubung dengan sistem informasi administrasi dan keuangan. Integrasi ini memungkinkan pengawasan kinerja yang lebih transparan serta memperkuat budaya kerja profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.

Keuangan memiliki peran vital dalam menjamin keberlanjutan program dan kegiatan di lingkungan keimigrasian. Menurut Mardiasmo (2018), tata kelola keuangan publik yang baik harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang efektif. Dalam konteks kelembagaan, sistem keuangan yang terintegrasi dengan BMN, SDM, dan tata usaha akan memudahkan proses perencanaan anggaran, pelaporan, serta evaluasi program kerja. Penggunaan anggaran berbasis kinerja memungkinkan alokasi dana dilakukan secara efisien sesuai kebutuhan prioritas lembaga. Dengan demikian, integrasi keuangan dalam sistem fasilitatif keimigrasian bukan hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana publik agar sesuai dengan tujuan pembangunan institusional.

Integrasi antara tata usaha, BMN, SDM, dan keuangan menjadi kebutuhan strategis dalam membangun sistem fasilitatif keimigrasian yang modern. Menurut Dwiyanto (2020), tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya sinergi antarunit pendukung administratif

melalui sistem informasi terpadu yang berorientasi pada hasil dan pelayanan masyarakat. Dalam konteks keimigrasian, integrasi ini memungkinkan setiap unit kerja saling terhubung dalam satu ekosistem data dan proses, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Sistem integratif juga memperkuat efektivitas koordinasi antarbagian, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan tumpang tindih kewenangan. Dengan penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian yang terintegrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat memperkuat posisi institusionalnya sebagai lembaga publik yang profesional, efisien, dan berdaya saing di era digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis normatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses integrasi tata usaha, Barang Milik Negara (BMN), sumber daya manusia (SDM), dan keuangan dalam sistem fasilitatif keimigrasian. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan integrasi tersebut lebih banyak berkaitan dengan aspek tata kelola organisasi, regulasi kelembagaan, serta kebijakan administratif yang bersifat non-eksperimen. Jenis penelitian kualitatif deskriptif memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi instansi keimigrasian dalam menyinergikan empat elemen pendukung tersebut. Selain itu, digunakan pula pendekatan normatif-yuridis dan manajerial, dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta praktik implementasinya di lapangan. Melalui cara ini, penelitian tidak hanya memaparkan data normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai sejauh mana regulasi tersebut efektif mendukung penguatan sistem fasilitatif keimigrasian di Indonesia.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang berkaitan langsung dengan bidang keimigrasian, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 juncto PP Nomor 26 Tahun 2016, serta sejumlah peraturan teknis di bidang keuangan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM aparatur. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur ilmiah, jurnal akademik, laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penggunaan dua jenis sumber data ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang komprehensif, baik dari sisi normatif maupun praktis. Data primer memberikan

dasar hukum yang kuat, sedangkan data sekunder memperkaya analisis dengan perspektif empiris dan teoritis terkait tata kelola kelembagaan di lingkungan keimigrasian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi akademik yang relevan dengan tema penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan integrasi tata usaha, BMN, SDM, dan keuangan dalam sistem administrasi publik. Sementara itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah arsip digital dan publikasi resmi dari instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kombinasi kedua teknik ini membantu peneliti memperoleh data yang kredibel dan terverifikasi, sehingga hasil analisis memiliki dasar yang kuat baik dari segi teoritis maupun regulatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga hanya data yang berkaitan langsung dengan integrasi tata usaha, BMN, SDM, dan keuangan yang dipertahankan. Selanjutnya, pada tahap klasifikasi data, informasi tersebut dikelompokkan berdasarkan empat aspek utama yang menjadi fokus penelitian untuk memudahkan analisis tematik. Tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis hubungan antarvariabel dalam konteks sistem fasilitatif keimigrasian, guna memahami bagaimana keterpaduan empat unsur administrasi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas kelembagaan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti merumuskan temuan utama mengenai urgensi integrasi dan menyusun rekomendasi strategis untuk peningkatan tata kelola keimigrasian. Melalui proses analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang strategi integratif yang dapat diterapkan dalam pengelolaan administrasi keimigrasian modern.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Usaha sebagai Fondasi Administrasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa tata usaha memiliki peran penting dalam mendukung sistem fasilitatif keimigrasian. Administrasi yang baik menjamin kelancaran dokumentasi, arsip, serta surat-menurut yang menjadi dasar bagi pelayanan publik maupun pengawasan. Tanpa tata usaha yang terintegrasi, data keimigrasian rentan tercecer atau tidak sinkron, sehingga menghambat pengambilan keputusan. Diskusi lebih lanjut mengungkap bahwa penerapan e-office dan digitalisasi arsip menjadi solusi strategis dalam meningkatkan efisiensi tata usaha.

BMN sebagai Sarana Prasarana Strategis

Pengelolaan BMN di lingkungan imigrasi masih menghadapi tantangan, seperti pendataan yang belum sepenuhnya akurat, serta pemanfaatan aset yang kurang optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak kantor imigrasi masih bergantung pada fasilitas fisik yang terbatas, padahal beban kerja pelayanan dan pengawasan terus meningkat. Integrasi pengelolaan BMN dengan sistem informasi keuangan negara (SIMAK-BMN) dapat memperkuat akuntabilitas dan mempermudah pemantauan aset. Diskusi menekankan perlunya optimalisasi penggunaan BMN berbasis teknologi, misalnya perangkat IT untuk mendukung pengawasan orang asing secara *real-time*.

SDM sebagai Motor Penggerak Layanan

SDM terbukti menjadi elemen paling krusial dalam sistem fasilitatif keimigrasian. Hasil kajian mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan imigrasi sangat ditentukan oleh kompetensi, integritas, dan profesionalisme pegawai. Namun, masih ditemukan ketidakseimbangan jumlah pegawai dengan beban kerja, serta adanya kesenjangan kompetensi, khususnya di bidang teknologi informasi. Diskusi mengarahkan pada pentingnya program capacity building yang berkelanjutan, rotasi pegawai berbasis kompetensi, dan penguatan nilai integritas untuk mencegah praktik maladministrasi.

Keuangan sebagai Penjamin Keberlangsungan Program

Aspek keuangan berperan vital dalam mendukung operasional keimigrasian, mulai dari penyediaan anggaran pelayanan publik, pengawasan, hingga penegakan hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa ketidaksinkronan antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil di lapangan kerap menimbulkan hambatan. Misalnya, kebutuhan teknologi pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Diskusi menekankan perlunya perencanaan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting),

agar setiap pengeluaran selaras dengan output yang diharapkan dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Integrasi dalam Sistem Fasilitatif Keimigrasian

Integrasi keempat aspek tersebut tata usaha, BMN, SDM, dan keuangan merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang modern, transparan, dan akuntabel. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketika sistem ini berjalan secara terpisah, muncul berbagai masalah seperti tumpang tindih administrasi, aset yang tidak termanfaatkan optimal, SDM yang tidak sesuai kompetensi, serta inefisiensi anggaran. Diskusi menyimpulkan bahwa sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan pengelolaan administrasi, aset, SDM, dan keuangan menjadi solusi utama. Implementasi teknologi digital seperti e-office, SIMAK-BMN, SIPORI, dan aplikasi keuangan negara harus dipadukan dalam satu platform yang dapat diakses lintas unit.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara tata usaha, Barang Milik Negara (BMN), sumber daya manusia (SDM), dan keuangan merupakan pilar utama dalam membangun sistem fasilitatif keimigrasian yang efektif, transparan, dan akuntabel. Keempat aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri, karena masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Tata usaha menjadi fondasi bagi pengelolaan administrasi dan dokumentasi, memastikan setiap kegiatan terekam dan tertata dengan baik. BMN berfungsi sebagai sarana dan prasarana strategis yang menunjang kegiatan operasional, sementara SDM menjadi motor penggerak utama yang menentukan keberhasilan setiap program dan kebijakan. Adapun keuangan berperan sebagai penjamin keberlanjutan program melalui pengelolaan anggaran yang terarah dan akuntabel. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketika keempat aspek tersebut berjalan secara parsial, muncul berbagai hambatan yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan keimigrasian. Ketidaksinkronan data antarunit kerja dapat menyebabkan keterlambatan administrasi, sedangkan keterbatasan sarana BMN berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Selain itu, kesenjangan kompetensi pegawai serta kurang optimalnya perencanaan anggaran juga memicu inefisiensi yang dapat menurunkan kualitas layanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa fragmentasi antarunit pendukung administratif harus segera diatasi melalui mekanisme koordinasi dan sistem kerja yang terintegrasi agar kinerja kelembagaan dapat meningkat secara berkelanjutan. Integrasi menjadi solusi strategis untuk membangun sinergi antarunsur pendukung keimigrasian. Dengan adanya sistem yang

terkoordinasi, seluruh proses administrasi, pengelolaan aset, pembinaan pegawai, dan penganggaran dapat dilakukan secara terpadu dan transparan. Penerapan sistem informasi terintegrasi menjadi langkah penting dalam menciptakan konektivitas antarunit kerja, sehingga data dan informasi dapat diakses secara real time dan akurat. Hal ini juga memungkinkan terciptanya sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan BMN dan anggaran, serta meminimalkan potensi kesalahan administratif. Selain penerapan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM menjadi aspek kunci dalam mewujudkan integrasi yang berkelanjutan. Aparatur keimigrasian perlu dibekali dengan kompetensi di bidang manajerial, digitalisasi administrasi, serta pemahaman terhadap tata kelola keuangan dan aset negara. Pelatihan berkelanjutan, pembinaan etika kerja, serta penguatan integritas diperlukan agar setiap pegawai mampu beradaptasi dengan sistem modern yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, SDM tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penggerak perubahan menuju birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada akhirnya, keberhasilan integrasi tata usaha, BMN, SDM, dan keuangan akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan keimigrasian dan pengawasan orang asing di Indonesia. Kolaborasi yang harmonis antarunit pendukung administratif dapat memperkuat posisi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi yang modern, profesional, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Integrasi ini juga menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan digitalisasi pelayanan publik, menjadikan sistem keimigrasian Indonesia lebih adaptif, efisien, dan terpercaya di mata masyarakat serta komunitas internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, yang telah menyediakan berbagai referensi regulasi dan laporan kelembagaan sebagai sumber utama penelitian.

Apresiasi juga disampaikan kepada para dosen, peneliti, serta rekan sejawat yang telah memberikan masukan, arahan, dan diskusi konstruktif selama proses penulisan. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian akademik dan praktik manajemen keimigrasian di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, R. (2020). Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 112-124.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Handayaningrat, S. (1994). *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, A. (2022). Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja dalam Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Manajemen Keuangan Negara*, 4(3), 87-101.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kemenkumham.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan PP No. 26 Tahun 2016.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Putri, M., & Suryanto, H. (2021). Integrasi Sistem Informasi dalam Pengelolaan SDM Aparatur. *Jurnal Birokrasi dan Manajemen Publik*, 9(1), 55-68.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0077 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.